

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

a. Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Riau sebesar 1,25 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,98. Inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 2,61 persen dengan IHK sebesar 105,92 dan terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 0,69 persen dengan IHK sebesar 107,88. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,76 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 3,48 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,53 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,85 persen, kelompok transportasi sebesar 0,70 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,57 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,48 persen; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen. Di sisi lain kelompok pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,66 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,30 persen. Secara month to month (m-to-m) pada Desember Provinsi Riau mengalami inflasi sebesar 0,62 persen. sedangkan secara year to date (y-to-d) Provinsi Riau mengalami inflasi sebesar 1,25 persen.

b. Berdasarkan hasil pantauan harga barang kebutuhan pokok selama triwulan IV Tahun 2024 (Oktober – Desember 2024) beberapa komoditi mengalami fluktuasi harga. Berikut hasil pantauan harga barang kebutuhan pada pasar pantauan di Provinsi Riau :

1. Beras

Harga beras di Provinsi Riau pada triwulan IV masih stabil. Adapun harga beras premium Rp. 17.000/kg, harga beras medium Rp.15.000/kg, dan harga beras SPHP Rp. 13.100/kg. harga beras premium terendah adalah Rp.15.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan harga beras premium tertinggi adalah sebesar Rp.17.000/Kg di-Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Gula Pasir

Harga rata-rata gula pasir pada Triwulan IV di Provinsi Riau sebesar Rp.17.785/Kg, sedangkan HET gula pasir sebesar Rp.17.500/Kg, harga gula pasir terendah adalah Rp.16.500/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan harga gula pasir tertinggi sebesar Rp.18.600/Kg setiap bulan pada Triwulan IV (konsisten) di Kabupaten Siak.

3. Minyak Goreng

Minyak goreng yang dipantau adalah minyak goreng curah, minyak goreng kemasan dan Minyakita, pada Triwulan IV harga minyak goreng di Provinsi Riau mengalami kenaikan terutama minyak goreng curah dikarenakan HET yang diatur hanya Minyakita dan kenaikan pada harga CPO. Harga minyak goreng curah pada triwulan IV berkisar dari Rp.16.500,- s/d Rp. 18.000,- per liter, harga minyak goreng kemasan rata-rata Rp.20.000,-/liter, sementara harga Minyakita Rp.16.000,-/liter, harga minyak goreng curah terendah adalah Rp.16.000/Kg setiap bulan pada Triwulan IV yaitu pada bulan Desember Kota Dumai Sedangkan harga minyak goreng curah tertinggi sebesar Rp.20.000/Kg di Kabupaten Kampar.

4. Daging Ayam Ras

Harga daging ayam pada triwulan IV mengalami kenaikan, terutama pada bulan Desember menjelang HBKN Nataru dengan harga rata-rata pada bulan Oktober Rp.35.000/Kg dan pada bulan Desember mengalami kenaikan menjadi Rp.37.000/Kg, harga daging ayam terendah adalah Rp.29.000/Kg pada bulan Desember di Kota Dumai. Sedangkan harga daging ayam tertinggi sebesar Rp.48.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Rokan Hulu.

5. Telur Ayam Ras

Pada triwulan IV harga telur ayam ras stabil dengan rata-rata harga Rp. 27.000 s/d Rp. 28.000 per kilogram sedangkan HAP telur ayam ras sebesar Rp.27.000/Kg, harga telur ayam ras terendah adalah Rp.25.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan harga telur ayam ras tertinggi sebesar Rp.31.600/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Kuantan Singingi.

6. Cabe Merah Keriting

Harga cabe merah keriting triwulan IV masih stabil dengan harga rata-rata Rp.35.000, s/d Rp.40.000,- per kilogram. Namun pada bulan Desember harga cabe merah keriting mulai merangkak naik karena faktor cuaca dan tingginya permintaan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru, harga cabe merah keriting terendah adalah Rp.29.600/Kg pada bulan Desember di Kota Dumai. Sedangkan harga cabe merah keriting tertinggi sebesar Rp.43.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Rokan Hulu.

7. Bawang Merah

Pada Triwulan IV harga bawang merah mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan III dengan harga rata-rata Rp.31.000,- s/d Rp.35.000/Kg. Kenaikan harga disebabkan menurunnya hasil panen sehingga pasokan bawang di pasar berkurang, harga bawang merah terendah adalah Rp.30.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan harga bawang merah tertinggi sebesar Rp.38.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Meranti.

8. Bawang Putih

Harga bawang putih pada triwulan IV mengalami kenaikan dari Rp.40.000,- per kilogram menjadi Rp.41.000,- per kilogram. Kenaikan harga bawang putih disebabkan pasokan yang berkurang, harga bawang putih terendah adalah Rp.38.600/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan harga bawang putih tertinggi sebesar Rp.45.000/Kg pada bulan Desember di Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

a. Komoditas yang mengalami kenaikan harga terjadi pada komoditas minyak goreng, bawang merah dan daging ayam ras:

- Kenaikan harga minyak goreng pada Triwulan IV disebabkan kenaikan harga CPO dan kernel sawit. Sementara untuk Minyakita rata-rata masih dijual diatas HET dikarenakan belum meratanya distribusi dan pedagang yang membulatkan harga menjadi Rp.16.000/liter.
- Pada bulan Desember 2024 beberapa harga komoditi seperti cabe merah keriting, daging ayam ras dan bawang merah mengalami kenaikan disebabkan

meningkatnya permintaan menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pelaksanaan Operasi Pasar di 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru;
- b. Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan, Keikutsertaan Satgas pangan dalam Rapat Koordinasi TPID dan dalam kegiatan lainnya seperti sidak pasar;
- c. Diversifikasi Pangan Lokal, Konsumsi beras per kapita menurun, konsumsi bahan pangan karbohidrat lainnya meningkat;
- d. Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan;
- e. Meningkatnya jumlah kelompok yang mengembangkan olahan produk pangan lokal;
- f. Meningkatnya kelompok pemanfaatan pekarangan;
- g. Penyusunan Database Ketersediaan Pangan;
- h. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- i. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- j. Pola Pangan Harapan (PPH), pembinaan pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman);
- k. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis;
- l. Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website;
- m. Dalam rangka upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman hortikultura khususnya Cabai telah diambil kebijakan;
- n. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabai, saat ini realisasi pertanaman per TW-IV telah ditanami seluruhnya (50 Ha), namun sebagian besar baru pada Bulan September ini melakukan penanaman dan beberapa kelompok tidak merawat tanaman cabainya dikarenakan saat itu harga yang anjlok. Dari 50 Ha tersebut, telah panen dengan total panen sebanyak 240.000 Kg (240 Ton);
- o. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Menanam Cabai (Anggaran APBD Perubahan) di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Pekanbaru, Dumai, Kabupaten Pelalawan dan Kampar, melalui pembagian benih cabai dalam polybag sebanyak 5.000 batang, dalam rangka mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga khususnya cabai. Pembagian bibit cabai dalam polybag telah selesai didistribusikan kepada 5 Kelompok Wanita Tani di 4 Kab/Kota dan sudah mulai berproduksi dan diperkirakan dari kegiatan ini akan menghasilkan cabai sebanyak 1,8 Ton.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Bapanas;
- b. Optimalisasi peran dan tugas Satgas Pangan, Bersama mengawasi distributor penyuplai bahan pangan strategis dalam hal ketersediaan bahan pangan strategis dan harga bahan pangan strategis serta membuat kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan;
- c. Penyusunan Database Ketersediaan Pangan. Tersedianya database ketersediaan pangan untuk mengetahui daerah yang mengalami surplus/defisit ketersediaan pangan strategis;
- d. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Tersedianya CPPD untuk menjaga ketersediaan beras jika terjadi fluktuasi harga beras, defisit pasokan beras, gagal panen, serta terjadinya bencana alam;

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Tersedianya database SKPG untuk mengetahui daerah yang mengalami rawan pangan dan aman pangan dalam hal ketersediaan pangan;

- f. Pola Pangan Harapan (PPH), tersampainya sosialisasi konsumsi bahan makanan dengan cara B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat serta untuk mengetahui tingkat keberagaman konsumsi masyarakat di Provinsi Riau;
 - g. Prognosa Ketersediaan Pangan. Tersedianya database prognosa ketersediaan pangan untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan pangan strategis di bulan/tahun yang akan datang;
 - h. Pembentukan database surplus/defisit komoditas pangan strategis. Tersedianya informasi mengenai mengenai produksi, stok, dan harga pangan strategis;
 - i. Pemantauan, pengadaan, penyaluran stok dan harga bahan pokok strategis, pengiriman data harga bahan pangan pokok di website. Tersedianya harga di tingkat konsumen, produsen, grosir, dan eceran di 3 pasar utama;
 - j. Penguatan kualitas statistik harga bahan Sinergi pencatatan harga antara Dinas Perindagkop, Dinas PTPH, Polda Riau, Bank Indonesia dan BPS Provinsi Riau untuk bersama mengawasi harga pangan strategis;
 - k. Pengembangan kawasan cabai/ bawang merah memang akan berpengaruh langsung terhadap produksi dalam rangka pengendalian inflasi, karena kita ketahui, Provinsi Riau hanya mampu menyediakan cabai merah sebanyak 36%, sehingga penting bagi Provinsi Riau menambah anggaran untuk pengembangan kawasan cabai dan bawang. Tahun 2023 Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan cabai ini seluas 10 Ha, namun tahun 2024 meningkat menjadi 50 Ha;
 - l. Melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2024, telah dilaksanakan Pengembangan Kawasan Cabai seluas 50 Ha dan Gerakan Tanam Cabai sebanyak 13.400 batang, sehingga diperkirakan akan mampu meningkatkan produksi cabai sebanyak 306,8 Ton;
 - m. Permasalahan yang timbul pada Triwulan IV ini, sebagian besar petani baru tanam pada Bulan September, sehingga terjadi pergeseran produksi. Pada saat harga cabai 14.000/kg ditingkat petani, mengakibatkan petani rugi dan kurang merawat tanaman cabainya, sehingga terjadi gagal panen dan produksi berkurang dari yang diharapkan;
 - n. Pelaksanaan Pasar Tani dan Pasar Tani Mobile secara langsung berpengaruh dalam membantu dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produksi petani lokal, sehingga memotivasi petani untuk lebih meningkatkan hasil produksi mereka baik secara kuantitas maupun kualitas, selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mendukung pertanian lokal. Juga sebagai upaya menjaga stabilitas komoditas penyumbang inflasi;
 - o. Gerai Hortmart berpengaruh dalam membantu memfasilitasi promosi dan penjualan produk pangan dari petani dengan harga yang layak, membantu menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas penyumbang inflasi;
 - p. Monitoring Harga dan Pasokan Rutin oleh Petugas PIP sangat berpengaruh dalam memberikan informasi terutama tentang harga dan pasokan sebagai acuan penentuan harga jual pada Kegiatan Pasar Tani/Pasar Tani Mobile dan mendeteksi lonjakan harga barang sebagai dasar bagi kebijakan pimpinan untuk penentuan jadwal Pasar Tani dan kebijakan lainnya;
 - q. Pengawasan dan Pendampingan dalam pengembangan kawasan cabai sangat berpengaruh untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan cabai berjalan sesuai rencana, mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sehingga dapat segera diatasi.
- e.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Operasi Pasar secara berkala dan insidentil pada periode tertentu melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berkerjasama dengan Bapanas. Diharapkan para Bank Indonesia, BUMD Pangan Kota Pekanbaru, BUMD Pangan Provinsi Riau, Bulog dan ID Food ikut berpartisipasi dalam penyediaan beraneka bahan pokok strategis dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM);
- b. Anggaran untuk memfasilitasi pengembangan kawasan Cabai di Provinsi Riau perlu ditingkatkan karena sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk yang berarti kebutuhan akan konsumsi cabai akan semakin meningkat pula, dengan pengembangan kawasan cabai, diharapkan daerah akan dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan cabai tanpa bergantung pada daerah lain. Meningkatkan anggaran berarti mendukung kestabilan pasokan dan harga;
- c. Anggaran untuk memfasilitasi Gerakan Tanam Cabai perlu ditingkatkan. Dengan anggaran yang lebih besar, lebih banyak kelompok wanita tani/masyarakat yang dapat diberi bantuan untuk menanam cabai di pekarangan;
- d. Anggaran untuk pelaksanaan Sekolah Lapang Good Agriculture Practices (SL-GAP) perlu dialokasikan, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas lapangan dalam hal budi daya tanaman cabai agar tercapai peningkatan produksi cabai;
- e. Anggaran untuk memfasilitasi Pasar Tani di Provinsi Riau perlu ditingkatkan, karena kegiatan ini sejalan dan melengkapi Kegiatan Pasar Murah/Gerakan Pangan Murah yang ditaja oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau dan Bapanas serta sangat membantu petani dalam mempromosikan dan menjual produk-nya.
- f. Anggaran untuk memfasilitasi Gerai Hortimart perlu ditingkatkan, karena sangat membantu petani dalam mempromosikan dan menjual produk-nya.
- g. Kapabilitas Petugas PIP agar lebih ditingkatkan lagi melalui pelatihan atau workshop.
- h. Pengawasan dan Pendampingan dalam pengembangan kawasan cabai agar lebih ditingkatkan lagi.